

Borneo-Kalimantan: Satu Pulau Dua Nama Tiga Negara Bersama Kaboka Merentas Ke Puncak Ilmu Sosial dan Kemanusiaan

Ade M Kartawinata¹

surel:amkartawinata@gmail.com

Abstrak

Konferensi Antaruniversiti se Borneo-Kalimantan (KABOKA) yang diprakarsa oleh Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak, telah dilangsungkan sejak tahun 2005, diikuti oleh pelbagai universiti di Borneo-Kalimantan yang berada di tiga Negara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Untuk itu, puluhan makalah serta kertas kerja telah dibentangkan guna membahas isu bersama tentang Borneo-Kalimantan oleh para sarjana ilmu sosial dan kemanusiaan di kawasan ini. Dari penyelenggaraan konferensi yang berterusan ini, acapkali juga semua makalah dan kertas kerja mengupas dengan kritis pelbagai realitas dan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi dan sumber alam serta kebijakan atau policy di masing-masing negara. Lantaran itu, makalah ini akan membincangkan dan menjawab soalan-soalan tentang: (1) apakah KABOKA telah menjadi wadah jalinan kerjasama kesarjana se Borneo-Kalimantan di dalam memahami pelbagai realitas dan fenomena tersebut yang tidak tersekat-sekat oleh adanya batas-batas negara sesuai asasi ilmu pengetahuan; dan (2) apakah pula KABOKA dapat dijadikan landasan guna membangkitkan gairah para sarjana di pulau ini bagi penciptaan keilmuan yang bersumber dari bumi Borneo-Kalimantan. Pemahaman atas soalan-soalan itu, berasaskan pada perspektif transnasional, dengan mendekonstruksi kesejarahan, pengaruh dinamika politik dan ekonomi lintas wilayah atau negara di pulau Borneo-Kalimantan.

Pendahuluan

Barangkali tidak begitu disadari lagi, bahwa kawasan Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi tanah air yang penting bagi pelbagai pertumbuhan teori dan konsep-konsep utama di jagat ini, terutama bagi ilmu sosial dan kemanusiaan, khususnya antropologi dan sosiologi. Begitu juga dengan Kalimantan yang menjadi sebutan resmi Indonesia bagi salah satu pulau yang terbesar dari puluhan pulau besar yang menjadi wilayah Indonesia, dan

Borneo bagi sebutan resmi Malaysia dan Brunei Darussalam, menjadi kawasan subur tempat tumbuhnya berbagai teori atau konsep-konsep ilmu sosial dan kemanusiaan, termasuk di dalamnya kebudayaan. Karena itu, tidak mengherankan manakala, pertemuan para sarjana dari pelbagai universitas di pulau ini yang meliputi tiga negara menjadi wacana ke arah mewujudkan suatu kajian ilmu asli yang dilahirkan oleh para ilmuwan peribumi.

Boleh menengok ke latar penemuan pelbagai teori dan konsep-konsep ilmu sosial

1 Makalah dikemukakan pada KABOKA (Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimantan) Ke-6 Warisan dan Sumber: Pengertian Sejarah, Budaya dan Alam Borneo-Kalimantan, 23-24 Mei 2011 di Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas Prakarsa Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak

2 Lektor Kepala Antropologi Agama dan Etnografi pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran - Bandung Provinsi Jawa Barat - Indonesia.

dan kemanusiaan di dunia ilmu pengetahuan sejagat, tampaknya kawasan Asia Tenggara, sebagai lahan subur temuan-temuan teori dan konsep-konsep itu. Sekalipun tidak mungkin menguraikannya secara singkat dalam makalah ini. Namun mungkin ada gunanya juga menyebutkan sepintas lalu beberapa dari temuan teori dan konsep-konsep ilmu sosial dan kemanusiaan dari kawasan Asia Tenggara oleh para peneliti asing. Meski, peneliti tempatan sampai hari ini masih juga menjadi pengguna setia teori dan konsep-konsep ilmu tersebut. Tentu bukan berarti sampai saat ini pun para peneliti ilmu sosial dan kemanusiaan peribumi tertegun diam, tetapi justru kita saat ini berkumpul di Palangka Raya ini sedang mengarahkan orientasi ke penemuan teori-teori dan konsep ilmu sosial kemanusiaan oleh para sarjana peribumi di pelbagai universitas yang ada di Borneo-Kalimantan.

Siapa yang tidak mengenal James Scott yang menumbuhkan teori moral ekonomi petani dan lawannya sekaligus, yaitu Popkin yang mengupas tentang petani rasional, keduanya mengangkat teori itu bersumber dari penelitiannya di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula, teori Wertheim tentang minoritas pedagang (*trading minorities*) berasal dari pengamatannya di kawasan Asia Tenggara. Hal yang serupa juga, ditunjukkan oleh Furnivall, tentang teori masyarakat plural (*the plural society*), adalah hasil pengamatannya tentang bertemunya beberapa kelompok etnis yang berbeda di kawasan ini.

Dari waktu yang lebih mutakhir lagi, dapat disebut sarjana yang berasal dari Jerman, Evers dan Schiel yang mengungkap konsep tentang kelompok strategis (*strategische gruppe*), yaitu tentang naik dan menguatnya elit nasional di kawasan Asia Tenggara dengan cara menguasai sumber daya strategis untuk mempertahankan posisi mereka di tengah-tengah masyarakatnya, baik dengan cara menguasai sumber politik untuk keuntungan ekonomi, maupun dengan mengontrol sumber daya ekonomi untuk keperluan politiknya.

Belum lagi, teori yang diwujudkan Clifford Geertz, yang bagi Indonesia kehadiran teori ini mengantarkan rejim Soeharto dapat menjalankan pemerintahannya selama lebih-

kurang 33 tahun. Sekalipun teori Geertz ini menimbulkan banyak kritik, tetapi dalam prakteknya teori ini tetap berkibar sampai sekarang ini, bahkan menjadi suatu kekuatan politik bagi Soeharto ketika itu, untuk menundukan lawan politiknya dalam wadah politik aliran.

Lantaran itu, tidak berlebihan kiranya untuk mengatakan, bahwa Clifford Geertz adalah seorang yang menunjukkan di kawasan ini menjadi begitu subur menghasilkan konsep-konsep ilmu sosial dan kemanusiaan. Beberapa konsep yang diwujudkan Geertz dan kemudian menjadi begitu luas mempengaruhi pemikiran para sarjana peribumi, adalah involusi pertanian, bazar dalam perdagangan, kota-hampa dalam perkotaan, aliran dalam pengelompokan politik modern, negara teater dalam politik klasik, lingkup dan intensitas religius dalam kehidupan agama (*the scope and the force of religion*). Semua itu, digali dari alam budaya di kawasan ini.

Demikian pula, jika merujuk pendapat Kuang-Hsing Chen (2010), dalam bukunya *Asia Method: Toward Deimperialization*, yang menyebutkan tentang lemahnya kerja sama intelektual di kawasan Asia. Menurut Kuang-Hsing Chen, para intelektual Asia lebih banyak bergaul dengan koleganya di Amerika atau Eropa daripada memilih Seoul, Bangalore atau kota-kota besar di wilayah Asia ini sebagai pusat pertemuan ilmiahnya. Dalam perkataan lainnya, intelektual Asia lebih nyaman dan lebih bangga bertukar pikiran dengan mereka yang berada di kawasan Amerika dan Eropa ketimbang dengan sesamanya dari kawasan Asia. Karena itu pula, menurut Kuang-Hsing Chen, pembelajaran Asia mestinya dipetik dari sejarah panjang negara-negara di Asia Timur dalam melakukan transformasi. Korea Selatan dengan bangga mengikrarkan keberhasilannya membangun negara yang modern, demokratis, dan progresif.

Demikian juga, Singapura, mampu membangkitkan nasionalisme yang kuat di tengah keterbatasan hak politik warga sipilnya. Lain halnya dengan Taiwan yang menurut Kuang-Hsing Chen, pengaruh dan sengketa politik dengan China, pengalaman dijajah Jepang, dan posisinya di bawah hegemoni AS,

mampu mengatasi kecemasan itu dengan mendeskonstruksi ketiga pengaruh tersebut ke arah mengembangkan pola transformasi yang positif. Dalam konteks itu, Kuang-Hsing Chen, melalui bukunya ini mengajak bahwa masyarakat Asia sudah semestinya memperoleh inspirasi dari warga Asia lainnya.

Ajakan Kuang-Hsing Chen, boleh jadi ada benarnya, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan para sarjana di kawasan Asia termasuk juga sarjana di kawasan Asia Tenggara, harus lah mulai menoleh pembelajaran keilmuan dari tanah airnya sendiri. Demikian pula, dalam memperoleh inspirasi untuk menggali dan mengembangkan teori dan konsep-konsep ilmu dari sesama sarjana Asia. Lantaran itu, dalam makalah ini akan membincangkan dan menjawab soal-soalan tentang: (1) apakah KABOKA telah menjadi wadah jalinan kerjasama kesarjanaan se Borneo-Kalimantan di dalam memahami pelbagai realitas dan fenomena tersebut yang tidak tersekat-sekat oleh adanya batas-batas negara sesuai asasi ilmu pengetahuan; dan (2) apakah pula KABOKA dapat dijadikan landasan guna membangkitkan gairah para sarjana di pulau ini bagi penciptaan keilmuan yang bersumber dari bumi Borneo-Kalimantan. Pemahaman atas soal-soalan itu, berasaskan pada perspektif transnasional, dengan mendekonstruksi kesejarahan, pengaruh dinamika politik dan ekonomi lintas wilayah atau negara di pulau Borneo-Kalimantan.

Latar dan Filosofis

Latar belakang Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimantan yang dicanangkan oleh Prof. Abdul Halim Ali Kursi Nusantara Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak, bersama-sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia, menunjukkan keinginan besar ke arah terwujudnya interaksi para sarjana yang secara bersama membina ilmu sosial dan kemanusiaan yang tumbuh di kawasan Borneo-Kalimantan. Penumbuhan konferensi Antaruniversiti se Borneo-Kalimantan, yang untuk selanjutnya dikenal dengan istilah

KABOKA, pertama kalinya diselenggarakan di Universiti Malaysia Sarawak pada tahun 2005.

Konon, terciptanya gagasan menyelenggarakan KABOKA ini, menurut Abdul Halim Ali (2005), dilandasi oleh pemikiran, sejak abad ke-15, kuasa-kuasa penjajahan Portugis, Belanda dan Sepanyol, meminjam istilah Pramoedya Ananta Teor, adalah kuasa "arus balik" yang telah mengubah trajektori sejarah perkembangan masyarakat di rantau ini, satu zon budaya, satu kultukreis yang dipanggil Nusantara (nusa=tanah; antara) termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Lalu, oleh kuasa-kuasa penjajah itu dibagi-bagikan wilayah Nusantara itu menurut daerah kekuasaan masing-masing dan berkembanglah rumpun tersebut menurut acuan imperial yang berlainan sehingga berdirinya negara bangsa moden seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina dan Malaysia.

Sekarang ini, sebagian besar dari mandala budaya Nusantara menjadi negara-negara modern di Asia Tenggara yang bagian utamanya ialah Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia. Setelah ratusan tahun berkembang bersendirian menurut acuan yang ditentukan oleh kuasa-kuasa penjajah dan terutamanya melalui peralatan ideologi negara kolonial, menyebabkan sistem pendidikan yang berbeza-beda antara satu tanah jajahan dengan tanah jajahan yang lain. Turut terdampak akibat tuntutan ideologi tersebut ialah pada lingkup ilmu pengetahuan.

Realitas politik ideologi negara yang ditanamkan kolonial, juga ternyata berpengaruh pada epistemologi, yaitu teori yang dapat menentukan bagaimana manusia memperoleh pengetahuannya tentang alam luarannya juga berbeza-beda antara kedua negara Malaysia dan Indonesia, khususnya. Selama beberapa waktu, penduduk kedua negara ini khususnya, tidak lagi mengerti, apalagi mengalami dan merasai posisi epistemologi masing-masing teori yang berbeza-beda itu. Oleh karena perbezaan itu, menyebabkan berkelainan pula ontologi, iaitu cara kita memahami dunia, eksistensi, serta fitrah manusia.

Selain itu pula, di kalangan para sarjana baik yang berada di Indonesia, Brunei Darussalam maupun di Malaysia, kita masing-masing sering berinteraksi secara akademik dengan negara-negara pilihan masing-masing, baik di timur maupun di barat, tetapi secara relatif kurang antara para sarjana Malaysia dengan Indonesia, malah dengan Brunei Darussalam. Oleh karena kurang sekali interaksi akademik dan pertemuan intelektual antara Sarawak dan juga Sabah dengan keempat provinsi di Kalimantan, tetapi juga dengan negara Brunei Darussalam untuk sekian lama, maka Institut Pengajian Asia Timur di Universii Malaysia Sarawak, berkat dukungan canselorinya dan kerjasama kerektoran Universitas Tanjungpura, Pontianak serta Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik di situ, memprakarsakan satu forum bersama bagi maksud menaikkan interaksi demikian.

Perhimpunan para sarjana yang digagas tersebut, untuk pertama kalinya diadakan di Kota Samarahan dengan Institut Pengajian Asia Timur sebagai penyelenggaranya. Pertemuan yang kemudian diberi nama Konferensi Antaruniversiti se Borneo-Kalimantan, diharapkan dapat mencetuskan pertukaran akademik berasaskan sekalian hasil penelitian oleh para staf akademik serta juga peneliti lainnya tentang pulau Borneo-Kalimantan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh para penyelidik seantero pulau ini. Lokasi perhimpunan seperti ini pula dicadangkan supaya bergilir-gilir di kalangan negara Brunei Darussalam, Provinsi-provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sabah Malaysia.

Konferensi antaruniversiti di pulau Borneo-Kalimantan ini berkisar pada tema utama mengenai transformasi sosial. Tema yang menjadi rujukan setiap penyelenggaraan konferensi dimaksudkan, sebagai wahana untuk mendirikan kerjasama yang erat dan mantap di kalangan warga akademik, terutamanya angkatan mudanya yang cukup prihatin akan arah dan kecenderungan transformasi sosial di rantau ini.

Menilik jumlah universitas di seluruh pulau Borneo-Kalimantan dengan jumlah staf

akademik di pelbagai jurusan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan tentunya jumlahnya mencapai angka ratusan. Tentu saja manakala potensi besar tenaga akademik di ketiga negara yang melingkupi pelbagai universitas itu, tergabung hasil penyelidikan atau penelitiannya maka, sumbangan tersebut kepada korpus pengetahuan tentang pulau ini akan menjadi terpancang. Jika, dibandingkan manakala penulisan-penulisan itu hanya dihasilkan secara perseorangan oleh warga pulau ini.

Ringkasnya, konferensi antaruniversiti ini menjadi satu lagi forum bagi para sarjana, terutamanya warga Borneo-Kalimantan. Dari situ, maka diharapkan dapat dibangunkan dan digabungkan keserjanaan dalam upaya bersama membina pengetahuan ilmu sosial dan kemanusiaan tentang isu-isu sosial yang berpancamuka sifatnya itu.

Konferensi ini juga dapat memberikan kesempatan untuk membangkitkan isu dan masalah, baik kontemporer maupun sejarah yang dihadapi negara, provinsi dan negeri di Borneo-Kalimantan. Pada sisi lain pula dapat diperiksa keadaan pengajian Borneo-Kalimantan, lalu mengusulkan cara terbaik bagi memajukannya dengan merenungkan kecenderungan pembangunan baik keilmuan maupun masyarakat warga Borneo-Kalimantan pada masa-masa lalu bagi menghadapi pelbagai cabaran pada masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Dari Kaboka Ke Kaboka: Wahana Jalinan Keserjanaan Pengaji Borneo-Kalimantan

KABOKA yang diselenggarakan pertama kali oleh Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) pada tanggal 29 - 30 Agustus 2005, mengambil tema Transformasi Sosial Masyarakat-Masyarakat di Daerah Pesisir Borneo-Kalimantan. Pada konferensi pertama ini, para sarjana dari negara Brunei Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sabah, dan Malaysia Semenanjung berhimpun di Kota Samarahan, Sarawak untuk membicarakan pelbagai isu berkaitan masyarakat pesisir di pulau ini. Empat puluh satu makalah telah dibahas oleh depalapan

puluh lebih peserta konferensi (Abdul Halim Ali, 2005).

Seri pertama konferensi ini mempertemukan para sarjana yang telah, sedang, dan akan melakukan penelitian tentang masyarakat yang berada di daerah pesisir di Borneo-Kalimantan. Pelbagai isu, masalah serta kemungkinan pada masyarakat-masyarakat tersebut, baik dari perspektif kontemporer maupun historikal menjadi fokus pembahasan. Karena itu pula melalui konferensi ini mencoba menilai kemajuan penelitian yang pernah dan sedang dilaksanakan di daerah-daerah pesisir di Brunei Darussalam, di Provinsi-provinsi Kalimantan, di Sabah dan di Sarawak. Perbincangan diarahkan pada kerangka yang lebih luas dan umum tentang transformasi sosial di masing-masing negara, negeri dan provinsi dengan masyarakat yang berada di daerah pesisir itu, dan apakah pula kecenderungan-kecenderungan penelitian waktu lampau, masa kini dan apakah pula kemungkinan-kemungkinannya untuk masa yang akan datang dalam kaitannya dengan transformasi sosial di daerah-daerah itu.

Pada KABOKA Ke-2 yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 13-15 Agustus, 2006, memperbincangkan tema konferensi, yaitu: "Masyarakat Perkotaan di Borneo-Kalimantan". Tema kedua konferensi ini lebih menyorot isu dan masalah transformasi sosial yang terkait dengan kehidupan masyarakat perkotaan di pulau ini. Untuk memperbincangkan tema konferensi tersebut, para sarjana dari keempat-empat propinsi Kalimantan, Brunei Darussalam Darussalam, Sabah, Sarawak dan Malaysia Semenanjung telah berbicara sejumlah 53 makalah tentang isu-isu masyarakat-masyarakat kota di pulau Borneo-Kalimantan (Abdul Halim Ali, 2006).

Dalam konferensi kedua ini, ternyata selain diikuti oleh para sarjana dari Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, juga diikuti oleh peserta dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lantaran itu pada konferensi ini setiap entitas di Borneo-Kalimantan terwakili. Keterwakilan

peserta dari pelbagai entitas yang ada di Borneo-Kalimantan ini jelas sejalan dengan latar dan filosofis konferensi untuk menghimpun pelbagai pemikiran dari para sarjana yang menaruh perhatian dan minat mengkaji dan meneliti Borneo-Kalimantan.

KABOKA Ke-3, merupakan perbincangan untuk melengkapi perbincangan yang belum juga diselesaikan pada konferensi sebelumnya. Fokus perbincangan untuk memperdalam arah transformasi sosial yang berlangsung di Borneo-Kalimantan. Karena itu, tema konferensi kali ini adalah "Transformasi Sosial: Merenungkan dan Memformulasikan Kebijakan/Dasar (policy) Pembangunan di Borneo-Kalimantan".

Konferensi ketiga ini diadakan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 -19 Mei, 2007. Konferensi ini mempertemukan para sarjana di pulau ini yang telah, sedang, dan akan melaksanakan sebarang penelitian tentang masyarakat Borneo-Kalimantan dalam rangka dan konteks pelaksanaan kebijakan/dasar pembangunan di negara masing-masing (Abdul Halim Ali, 2007).

Latar dan filosofis penyelenggaraan konferensi ketiga ini, berawal dari pemikiran, bahwa sejak Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan masing-masing, maka pelbagai perancangan pembangunan nasional telah dilaksanakan oleh ketiga-tiga negara serumpun itu. Setelah mengarungi dan malampauai jaman pembangunan selama beberapa dasawarsa, yang semua pelaksanaan pembangunan itu berpedoman pada beberapa teori pembangunan.

Kadangkala teori pembangunan yang dijadikan sandaran pelbagai kebijakan atau dasar pembangunan itu bersumber dari barat dengan perspektif dan alam pikiran mereka, mungkin saja dalam penerapannya pembangunan itu mengabaikan situasi dan alam budaya lokalnya. Lantaran itu, sewajarnya para akademisi dari Brunei Darussalam, Sabah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sarawak dapat

memikirkan secukupnya proses pembangunan yang terjadi di tempat masing-masing negara di Borneo-Kalimantan, lalu menilai manfaat dan konsekuensinya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Dalam konteks pemikiran itu, memang ada hasil yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan yang diperbincangkan tersebut, namun terdapat banyak juga konsekuensi yang tidak terduga. Tentunya timbul pelbagai isu, masalah serta kemungkinan pada masyarakat di pulau ini, baik dilihat dari perspektif kontemporer maupun historikal, tentunya membawa perbagai akibat dan pengaruhnya, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya.

Konferensi ketiga ini menilai kemajuan penelitian yang pernah dan sedang dilaksanakan oleh para akademisi di Borneo-Kalimantan dalam rangka transformasi sosial di tempat masing-masing. Apakah kecenderungan-kecenderungan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian tersebut, baik bagi kehidupan akademik maupun kehidupan sosial masyarakat di pulau Borneo-Kalimantan Banjarmasin. Atau, konferensi ini pun menjawab persoalan-persoalan, apakah kesan-kesan daripada pelbagai agenda pembangunan di Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak, Provinsi-provinsi pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat? Apakah pula isu dan agenda tambahan yang muncul dari sekalian program dan agenda pembangunan yang dilaksanakan di pulau ini?.

Demikian pula, apakah konsekuensi yang tidak terduga dari pembangunan tersebut? Selain pengkajian yang lebih bersifat kebijakan bagi pembangunan di kawasan Pulau Borneo-Kalimantan, juga memfokuskan pada penilaian keilmuan itu sendiri, atas sejumlah persoalan keilmuan yang terkait dengan arah transformasi sosial, yaitu: sejauhmanakah kemajuan penelitian ilmu pengetahuan (science) dan teknologi di Borneo-Kalimantan, demikian pula sejauhmana ilmu sosial dan kemanusiaan berevolusi di Borneo-Kalimantan yang berkaitan dengan isu pembangunan dan pendidikan?.

KABOKA Ke-4 merupakan respons terhadap sejumlah persoalan akademik yang belum selesai dibahas pada konferensi ketiga sebagai upaya penyatuan kesarjanaan se Borneo-Kalimantan di dalam kerangka pemahaman transformasi sosial. Konferensi keempat ini pun tidak dapat dilepaskan dari keinginan besar penyelenggara dalam menilai kemajuan penelitian yang pernah dan sedang dilaksanakan oleh para ahli akademik di Borneo-Kalimantan dalam rangka transformasi sosial, ekonomi politik dan lingkungan alam di pedesaan masing-masing negara di pulau ini.

Konferensi keempat yang bertema "Transformasi Sosial Masyarakat Pedesaan dan Pesisir Borneo-Kalimantan: Isu-isunya", telah dilaksanakan di Universitas Mularwarman, Kota Samannda Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 24 - 25 Juni 2008 dengan membahas 115 makalah, dari sejumlah makalah tersebut 162 makalah diantaranya dari para sarjana Indonesia, kemudian 26 makalah yang dipresentasikan oleh para sarjana dari Brunei Darussalam, dan sejumlah 91 makalah dari sarjana-sarjana Malaysia. Dalam realitasnya dari sejumlah peserta konferensi inipun tidak semuanya berasal dari para sarjana yang berada di universitas di pulau Borneo-Kalimantan, tetapi juga mereka yang datang dari universes yang berada semenanjung dan universitas yang ada kota-kota lain di Indonesia yang ada di luar pulau Kalimantan (Abdul Halim AH, 2008). Mercka yang menaruh minat atau sedang, telah dan akan melakukan penelitian di pulau Kalimantan.

Sebagaimana konferensi yang dilaksanakan sebelumnya, konferensi keempat ini, juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menimbulkan isu dan masalah, baik kontemporer maupun sejarah yang dihadapi negara, provinsi dan negeri di Borneo-Kalimantan. Pada sisi lain pula dapat diperiksa keadaan pengkajian Borneo-Kalimantan, lalu mengusulkan cara terbaik memajukannya dengan merenung kecenderungannya pada waktu-waktu lampau dan pelbagai cabarannya yang mendatang.

Memeriksa perkembangan kajian atau studi Borneo-Kalimantan, tampaknya menjadi tumpuan konferensi yang diadakan di

Universitas Mulawarman ini, telah dibahas oleh para penyaji makalah dan peserta konferensi, meski perbincangan itu menyisakan harapan agar pada konferensi berikutnya lebih menyediakan forum dan juga daerah pertemuan para akademisi dan para sarjana lainnya, istimewanya dari Pulau Borneo-Kalimantan yang prihatin akan masalah dan isu transformasi sosial di pulau ini, tetapi tidak berkesempatan berinteraksi.

Tema KABOKA Ke-5, merupakan kelanjutan dari konferensi keempat yang diadakan di Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, sebab tema yang ditentukan bagi konferensi kelima, berlatarbelakang soal di ketiga-tiga Negara-bangsa modern Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah mengalami proses modernisasi dan juga mengalami kondisi yang terhasil daripadanya, yaitu modernitas. Kedua proses dan kondisi itu menjadi lebih pantas pada masa pascakemerdekaan masing-masing negara-bangsa.

Atas dasar proses yang dialami masing-masing negara tersebut, itulah kemudian tema konferensi inipun terkait langsung dengan soal modernitas. Karena itulah, tema konferensi kelima ini, adalah "Transformasi Sosial di Borneo-Kalimantan: Pengalaman Modernisasi".

Sumbangan positif modernitas besar sekali dan hal tersebut tidak dapat disangkal. Modernisasi merupakan proses sosial menyeluruh termasuk industrialisasi yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat agraria di ketiga negara bangsa tersebut berkembang. Kondisi itu, kemudian menjadi masyarakat kontemporer seadanya. Sesungguhnya pula, konsep modernisasi lebih luas dari industrialisasi semata-mata karena proses itu juga mencakupi bidang-bidang politik, budaya, ekonomi, sains dan teknologi.

Modernisasi politik, sebagai contoh memerlukan pengembangan lembaga-lembaga utama seperti kehadiran partiparti politik, parlimen, hak suara dan pemilihan umum yang sekalian lembaga yang didirikan itu mendukung proses buat keputusan partisipatif para warganya. Modernisasi budaya memunculkan sekularisasi vis-a-vis agama atau

sekurang-kurangnya unsur-unsur utamanya serta juga kepatuhan para warganya kepada ideologi nasional.

Modernisasi ekonomi pula mencetuskan perubahan ekonomi yang mendalam kepada masyarakat, seperti terjadinya pembahagian kerja (division of labour) yang semakin rapi dan kecil, pemakaian teknik manajemen dan teknologi yang memanfaatkan serta pertumbuhan fasilitas komersial. Ekonomi terglobal neoliberal turut menjadi dimensi baru dalam modernisasi ekonomi, suatu hal yang kita belum mengerti sepenuhnya. Kondisi modernitas secara sejarahnya dihasilkan oleh upaya manusia mensejahterakan kehidupannya sejak abad ke-16, 17 dan 18 dengan cara membebaskan dirinya dari belenggu legitimasi kekuasaan keteraturan sosial-politik lama, termasuk upaya manusia menguasai alamnya dengan pemakaian ilmu pengetahuan (science) dan teknologi untuk maksud mencapai kebahagiaan demikian.

Ringkasnya, modernitas kelihatan pada prinsipnya satu gabungan harmonis antara pertimbangan sehat yang kritis (critical reasoning) dengan kebebasan individu serta tanggungjawab yang mengiringinya. Kelihatan juga keprihatinan modernitas kepada kemajuan sosial yang dimungkinkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, industrialisasi, dan demokrasi.

Namun begitu, sebaliknya, sumbangan positif tersebut didapati juga beberapa ciri negatif dari modernitas. Ternyata sekarang, maksud konsep modernitas menjadi kurang wajar lagi malah telah menyimpang dari tujuan awalnya. Penyimpangan keseluruhan modernitas termanifestasi dalam beberapa segi hidup. Misalnya, nilai individu yang peribadi sifatnya diletakkan di tengah-tengah, lalu meminggirkan nilai-nilai yang berlaku umum dalam hubungan antarmanusia.

Telah juga terdapat kecenderungan sistematis ke arah pertimbangan ekonomi yang menggerhanakan unsur-unsur lain dalam kemajuan sosial. Diamati bahwa logika persaingan atau competition mengatasi logika kewargaan dan kebersamaan dan kerjasama sosial, sementara pertimbangan sehat yang kritis (critical reasoning) diturunkan menjadi rasionalitas akuntansi yang tentunya terarah

kepada upaya pencapaian keuntungan yang melimpah. Karena capaian itu semata-mata untuk peluasan modernitas sebagai manifestasi sistem kapitalis.

Fokus perbincangan tentunya di arahkan agar kedua-dua jenis sumbangan modernitas positif dan/atau negative ke atas evolusi sosial masyarakat-masyarakat di pulau Borneo-Kalimantan mempunyai kebenaran masing-masing. Jadi, dalam konteks demikian, maka diharapkan pada konferensi ke-5 terdapat debat tentang dampak modernisasi dan juga modernitas pada seluruh segi kehidupan masyarakat di pulau ini, baik yang menyangkut sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dari situasi itu, secara bersama-sama memberikan sumbangan analisis bagi menggalakkan perenungan mendalam dan seterusnya mencapai sintesis tentang memajukan seluruh segi kehidupan masyarakatnya.

Ternyata juga proses dan kondisi tersebut tadi menjadi lebih kompleks lagi dengan kemasukan unsur-unsur ekonomi terglobal selama satu dua dekade belakangan ini. Di samping itu pula, terdapat masyarakat-masyarakat di pulau ini yang tidak berupaya memanfaatkan modernitas, tetapi malah masih melangsungkan hidupnya secara tradisional khususnya, di pedalaman pulau Borneo-Kalimantan yang melingkupi tiga negara yang salahsatunya termasuk negara kaya di dunia ini.

Apakah capaian pengalaman di pulau Borneo-Kalimantan sejak modernisasi dijalankan? Apakah pula kesan-kesan positif dan negatif dari modernisasi ini? Apakah juga transformasi sosial yang drastik tercapai dari modernisasi? Apakah dampaknya kepada norma sosial atas capaian modernisasi itu kepada masyarakatnya? Bagaimanakah menyelesaikan setiap ketegangan antara sekularisasi dengan agama akibat modernisasi itu? Apakah lembaga-lembaga sosial pribumi tidak lagi serasi dengan tuntutan lembaga modern? Atau, apakah kesan teknologi modern kepada warga masyarakat di pulau ini, baik yang ada di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam?

KABOKA Ke-6, diselenggarakan di Universitas Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 23 - 24 Mei 2011, bertemakan "Warisan dan Sumber: Pengertian Sejarah, Budaya dan Alam Borneo-Kalimantan". Tentunya, tema ini diilhami dari konferensi-konferensi yang telah diadakan sebelumnya. Menilik tema ini, tampaknya penyelenggara ingin menunjukkan, bahwa masyarakat dan alam pada masa dahulu dan sekarang di pulau Borneo-Kalimantan masih memerlukan banyak kajian dan pemahaman oleh semua insan di berbagai-bagai universitas yang ada di pulau Borneo-Kalimantan.

Berkenaan dengan minat dan keinginan memahami Borneo-Kalimantan yang begitu kuat dari setiap insan akademik universiti. KABOKA Ke-6, mencoba memberikan tumpuan perhatian dalam bentuk multi-disciplinary and cross-cultural kepada tiga strand, yaitu sains sosial, sains fizikal dan sains biologikal dalam kerangka pembangunan dan globalisasi saat ini (Kaboka, 2011). Untuk itu, jawapan mungkin akan diperoleh dan persoalan baru akan muncul dalam mengimbangi konflik di antara warisan dan sumber demi environmental, economical, social and cultural sustainability. Ini sekadar cadangan yang menjadi fokus konferensi ini, karena itu, pula patokan seperti ini bukan merupakan sekatan, tetapi sebatas sebagai petunjuk perbincangan dalam 3 strand disiplin sebagai berikut:

Sains Sosial: agama, arsitektur, bahasa, etnisiti, ekonomi, hubungan pesisir dan pedalaman, kerajaan awal dan moden, manuskrip, masyarakat pesisir, manusia dan alam, pembangunan, perubahan, perdagangan, pendidikan tradisional dan moden, sejarah, urbanisasi, pelancongan, pemerintah, politik, teknologi maklumat, internet dan lain-lain.

Sains Fizikal: alam bina (build environment), geoteknikhidrologi, kejuruteraan (Teknik) sumber air, pembangunan prasarana fizik, kejuruteraan pantai, dan lain-lain.

Sains Biologikal: biodiversitas, penglibatan masyarakat dalam pengurusan sumber, tumbuhan perubatan. ilmu tradisional, konservasi, pengendalian penggunaan sumber biologikal dan lain-lain.

KABOKA: Wacana Pembangkit Gairah Keahlian Ilmu Borneo-Kalimantan

Boleh jadi latar politik kenegaraan perwujudan negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berbeda-beda, sehingga menyebabkan pula perbedaan pandangan dalam perkembangan arah dan orientasi pengkajian Borneo-Kalimantan di ketiga negara ini. Meski dalam tataran keilmuan batas-batas politik kenegaraan tidak dapat dijadikan batas penyekat kebebasan perkembangan ilmu pengetahuan itu. Namun, dalam kenyataannya, politik yang melatarbelakangi pembentukan ketiga negara ini, cenderung telah membedakan perkembangan peranan dan orientasi keilmuan di masing-masing negara. Walau jika, ditilik dari latar sejarah kebudayaan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia bahkan Brunei Darussalam dapat dikatakan memiliki kesamaan. Dalam perkataan yang lain dapat disebut menjurus dalam satu garis kebudayaan Nusantara atau dalam bahasa kekinian di sebut kebudayaan serantau. Apalagi bagi warga masyarakat di pulau Borneo-Kalimantan, batas-batas relasi sosial dan budaya menjadi amat sempit dan boleh diperkatakan amat erat dalam melakukan hubungan sosialnya.

Menilik dari KABOKA ke KABOKA yang telah diselenggarakan, menunjukkan bahasan isu transformasi sosial dan pertemuan antarsarjana di pulau Borneo-Kalimantan dari segi capaian jumlah makalah dan jumlah peserta yang terlibat, dapat diperkatakan mencapai tujuan konferensi itu. Namun, dari segi akademik sebagai ciri yang terutama dari pertemuan para sarjana yang berhimpun, apakah juga dapat dikatakan telah mencapai tujuan?

Penilaian atas keberhasilan dari perjalanan singkat konferensi belum lah sepenuhnya dapat dilakukan. Begitu pun, penilaian dari sisi akademik atas sejumlah makalah yang disajikan pada setiap konferensi itu tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Sebab, keduanya terkait erat dengan begitu rumit dan keberagaman topik yang dijadikan bahasan tema konferensi, baik dari segi teoretikal maupun segi metodologi pada setiap bahasan makalah.

Walaupun demikian, penyelenggaraan konferensi yang dimulakan sejak tahun 2005 hingga kini di tahun 2011, boleh dikatakan suatu pertemuan kalangan akademik yang tidak bisa diabaikan begitu saja, di dalam khasanah keilmuan di Asia Tenggara khususnya di pulau Borneo-Kalimantan. Dari sisi keberhasilan penyelenggaraan dengan menghimpun banyak universitas di pulau Borneo-Kalimantan, yang sekaligus juga dengan latar ideologi negara yang saling berbeda satu sama lainnya, tentunya bukan suatu perkara yang mudah. Itu artinya, dengan telah diselenggarakannya konferensi untuk kali yang keenam inipun suatu hal yang sangat berharga dan membanggakan bagi insan akademik di kawasan ini.

Apalagi jika, dari pertemuan itu, boleh merangkumi dan mengemukakan pelbagai sejarah perkembangan keilmuan, pemahaman atas realitas teoretikal dan metodologi dari perspektif dan latar belakang, kreativitas dan tradisi keilmuan di masing-masing negara di pulau Borneo-Kalimantan menjadi fokus perhatian yang terutama. Tentunya, perkembangan ilmu di kawasan Borneo-Kalimantan akan semakin mewarnai pembangunan dan lingkungan alam sekitar sejalan dengan tradisi kemanusiaan dan tradisi keilmuan di pulau ini.

Sejarah perkembangan ilmu sosial, atau Malaysia menyebutnya sains sosial termasuk kemanusiaan, umumnya bermula di Barat. Perkembangannya boleh diterangkan sebagai reaksi dan respons intelektual untuk menjawab soalan falsafah asas berkaitan dengan kemunculan dunia moden industri dan pasca industri. Walau bagaimana pun, di Malaysia titik permulaan sejarah perkembangannya adalah berbeda dengan yang terdapat di Eropah. Tradisi perdebatan akademik untuk menjawab soalan falsafah dan perkembangan ilmu sosial serta tradisi memperibumikan ilmu ke dalam tradisi tempatan para sarjana di Malaysia, kerap kali dilakukan.

Berbeda dengan di Indonesia, perdebatan falsafah dan perkembangan ilmu sosial ke arah memperibumikan ilmu belum menjadi tradisi keilmuannya. Malah, ketika tahun 1985, Universitas Padjadjaran khususnya Jurusan

Antropologi bekerjasama dengan Jabatan Antropologi Sosiologi Universiti Kebangsaan Malaysia, mengadakan perbincangan peninjauan kembali terhadap ilmu sosial, terutamanya Antropologi dan Sosiologi yang mencakup teori, metodologi dan penerapan itu sesuai dengan keperluan teoretis dan praktisnya mendapat cabaran dari sesama sarjana ilmu sosial. Sebab, mereka beranggapan, bahwa ilmu sosial terutamanya Antropologi dan Sosiologi sebagai ilmu yang sudah jadi, yang tidak perlu digugat keberadaannya baik secara teoretik maupun metodologinya.

Belakangan ini, baru mulai tumbuh kembali keinginan untuk memperbincangkan ilmu dari sisi keperluan Indonesia. Dalam konteks itu, seperti dinyatakan oleh Sunyoto Usman (2011), kembangkan ilmu keindonesiaan, sebab metodologi Barat belum tentu sesuai dengan realitas Indonesia itu sendiri. Menurut Sunyoto Usman, saat ini perguruan tinggi di Indonesia hanya menjadi konsumen dari ilmu dan metodologi yang dikembangkan Barat.

Ilmu sosial yang diajarkan pun sekarang ini sifatnya sangat instan, tidak berangkat dari kondisi riil di Indonesia. Karena itu, dengan minimnya pengembangan ilmu yang berbasis keindonesiaan ini, membuat Indonesia mengalami stagnasi ilmu sosial. Akibat dari situasi seperti itu, adalah setiap solusi yang ditawarkan ilmu sosial di Indonesia selalu tidak relevan karena tidak sesuai dengan kehidupan nyata masyarakatnya.

Gugatan Sunyoto Usman, boleh jadi benar sebab selama ini, sarjana ilmu sosial di Indonesia seolah-olah sudah puas dengan capaian akademiknya secara pribadi, baik peroleh gelar akademik tertingginya bergelar doktor maupun guru besar di suatu perguruan tinggi. Itu artinya, mereka tidak lagi menjadi barisan yang penting atau utama dalam mengembangkan ilmu sosial yang berlatar keindonesiaan. Karena itu, tidak mengherankan manakala ilmu sosial di perguruan tinggi di Indonesia, hanya menjadi pasar dan konsumen dari produk pendidikan luar negeri. Akibatnya, perguruan tinggi di Indonesia tertinggal dari perguruan tinggi asing, termasuk oleh Malaysia yang telah lama memperdebatkan keberadaan

ilmu sosial di tengah cabaran keilmuan masa kini.

Perdebatan serupa itu, seolah-olah sudah menjadi tradisi keilmuan bagi setiap sarjana di Malaysia, sebagaimana dapat dicermati pada Jurnal Akademika Universiti Kebangsaan Malaysia, Nomor 66 (January), 2005. Dalam terbitannya itu, memuat semua artikel yang terkait dengan perkara dan orientasi perkembangan usaha untuk memperibumikan pengetahuan (*indigenisation of knowledge*) agar sesuai dengan keadaan tempatan.

Uraian panjang lebar dan lengkap mengenai falsafah, dan sejarah perkembangan ilmu sosial di Malaysia dalam memikir ulang ilmu sosial supaya sesuai dengan keadaan tempatan diungkapkan oleh sarjana-sarjana tempatan, diantaranya H.M. Dahlan (1985), Rustam A. Sani dan Norani Othman (1991); Shamsul Amri Baharuddin (1993 & 1998); Abdul Rahman Embong (1995 & 2003); Tham Seong Chee (1981); Ramasamy (1983), dan Ishak Shari et. al (1999). Perdebatan akademik yang berkaitan erat dengan keadaan sosial yang divujudkan oleh pemerintah kolonial, yang tentunya lagi kehadiran ilmu sosialnya pun, semata-mata hanya untuk memenuhi keperluan kekuasaan kolonial menjadi bagian yang utama dalam pembahasan akademik di kalangan sarjana itu. Karena itu, para sarjana itu beranggapan, bahwa kuasa kolonial sangat memerlukan ilmu sosial yang telah berhasil diwujudkankannya itu, terutama untuk memenuhi keperluan menyediakan dokumentasi sosial akan data dan maklumat yang relevan sehingga dapat diguna oleh pemerintahan kolonial bagi memuluskan atau melicinkan lagi pemerintahan penjajahan dalam penegakkan kekuasaannya.

Menurut Tham (1981), maklumat dan data ini dihasilkan oleh pegawai, pentadbir dan orang lain yang berada dalam perkhidmatan kolonialis itu. Namun demikian, menurut Tham lagi, setelah berakhirnya pemerintahan kolonial pada tahun 1957, pada tahun-tahun 1960an pula telah terdapat dorongan baru untuk mengkaji ilmu sosial. Dengan dorongan itu, pengembangan ilmu sosial yang berasaskan situasi dan kondisi tempatan belum lagi wujud. Tentunya, hal itu, disebabkan oleh cabaran

yang tidak mudah di kesampingkan begitu saja baik secara institusional maupun kuasa politik.

Olehnya itu, apa yang terjadi, pengekalannya kaedah kolonial dalam pengembangan ilmu tetap memperlihatkan satu perhubungan kuasa yang tidak seimbang di antara ilmu sosial di Barat dan yang terdapat di dunia bukan Barat. Ini dapat diamati ke atas pembagian tenaga global dalam ilmu sosial, yang dari segi sejarahnya merupakan akibat secara langsung dari kolonialisme akademik dan pergantungannya. Keadaan ini juga berfungsi mengekalkan neo-kolonialisme akademik dan pergantungan. Ciri-ciri pembagian tenaga ini ialah seperti pembahagian dan pemisahan di antara tenaga intelektual teoretis dan empiris, dan di antara kajian negara lain dan kajian negara sendiri (Alatas, 2000).

Sehubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh para sarjana itu, selain dari menilai ulang tentang status pengeluaran ilmu, terutama oleh dunia bukan barat, tema-tema yang muncul dalam wacana pasca kolonial di Malaysia harus diberi perhatian yang utama. Sebagaimana yang wujud belakangan ini, satu tema yang mula wujud dalam wacana pada peringkat akademik dan advokasi di Malaysia ialah tentang ilmu kolonial.

Para Sarjana seperti Shamsul Amri Baharuddin (2000), telah menjelaskan maksud dan implikasi ilmu kolonial mi Ice atas epistemologi dan identitas masyarakat yang menjurus kepada bagaimana kita menjalankan kehidupan budaya, politik dan ekonomi. Perbincangan mereka dapat dijuruskan pada ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan, karena pada satu tahap ia melibatkan dimensi intelektual, dan pada tahap yang lain, ia melibatkan dimensi institusi pengeluaran budaya dan pemikiran.

Dalam konteks ini, jelas sekali apa yang diharapkan oleh pengagah konferensi ini, bagaimanakah kita dapat mengkaji masyarakat sendiri dengan menggunakan epistemologi ilmu sosial yang ada kini pun hasil bentukan ideologi kolonial, yang tentunya pula tidak sejalan dengan perkembangan dan arah realitas sosial tempatan dan lingkungan alam di pulau Borneo-Kalimantan. Persoalan itu lah, yang ingin penulis kaitkan dengan makalah yang

diajukan dalam pembentangan di KABOKA Ke-6 ini. Apakah konferensi ini dapat dijadikan landasan yang kokoh guna membangkitkan gairah para sarjana tempatan bagi penciptaan keilmuan yang bersumber dari bumi Borneo-Kalimantan.

Tentunya, pemahaman ke arah perbincangan itu, tidak boleh dilepaskan dari perspektif perkembangan keilmuan dari masing-masing negara, termasuk di dalamnya dinamika politik dan ekonomi yang mempengaruhinya. Hal lain lagi yang juga tidak kalah pentingnya dalam membumikan ilmu sosial adalah penggunaan bahasa-bahasa Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kegiatan-kegiatan penulisan dan penelitian ilmu sosial bukan semata-mata karena bahasa-bahasa itu dijadikan bahasa kebangsaan, tetapi justru menjadi bahasa ilmu itu sendiri.

Dalam konteks ini, ilmu yang dihasilkan dalam situasi seperti itu, adalah hanyalah translation social science. Bukan mereformulasi teori dan epistemologi ilmu itu sendiri sesuai kegunaannya di kalangan masyarakat. Dalam pengertian ini, pemikiran sarjana tentang ilmu sosial yang berorientasi kepada tuntutan alam sosial, alam budaya, dan lingkungan alam fizikal tempatan, tampaknya harus berani mengambil langkah ke luar dari paradigma ilmu sosial yang telah berlaku baku selama ini. Artinya lagi, para sarjana tempatan harus berani menganggap dirinya sebagai pewaris dari tradisi ilmu, filsafat ilmu-ilmu sosial dan folk wisdom untuk kemudian mengambil unsur-unsur tertentu daripadanya bagi mereformulasi ilmu sesuai mememanfaatnya bagi masyarakat tempatan.

Konteks baru bagi penelitian di Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, itu lah yang dimaksudkan Abdul Halim Ali, dalam mencari upaya mereformulasi teori dan epistemologi ilmu (2008). Dari sejumlah makalah ucaptama yang disampaikan pada setiap konferensi, tampaknya hanya ada satu makalah ucaptama yang sejalan dengan tujuan konferensi, yaitu upaya mentradisikan ilmu dalam konteks tempatan. Makalah yang dibentangkan Abdul Halim Ali, pada KABOKA Ke-4, yaitu "Konteks Baru Bagi Penelitian di Malaysia dan

Brunei Darussalam, membentri arti penting dalam menjembatani perbedaan-perbedaan keilmuan baik teoretikal maupun metodologi di pulau Borneo-Kalimantan. Perbedaan yang dapat diatasi dengan melakukan penelitian.

Abdul Halim Ali (2008), dalam makalahnya tersebut, menyatakan, bahwa ilmu sosial di Malaysia, seperti juga halnya dengan Indonesia dan Brunei Darussalam, lahir, lalu berkembang untuk keperluan modernisasi dan karena itu amat pragmatik, utiliter dan empiris sifatnya agar terpenuhi keperluan tenaga kerja. Oleh karena itu, ilmu sosial di negara-negara tersebut tidak berkembang atas hasil tradisi murni ilmu itu sendiri maupun pengembangannya lewat wacana intelektual. Pengembangan ilmu di negara-negara itu mewarisi tradisi keilmuan Anglo-Saxon, untuk Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan Indonesia mewarisi tradisi intelektual Eropa (Belanda). Realitas tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing negara itu, tentunya berpengaruh terhadap daerah dan bidang analisis para sarjana itu sendiri yang sesuai dengan wilayah negara-bangsa dan asumsinya dalam daerah analisis demikian hanya bersandar pada negara-bangsa sejalan dengan pembentukan kesadaran atas masyarakat dan moresnya sendiri.

Dalam konteks pemikiran itu, tampaknya Abdul Halim Ali, juga mengajak memahami dan mengetahui lebih jauh lagi tentang pulau Borneo-Kalimantan perlu menghilangkan asas intelektual dan kesadaran meneliti yang dibatasi oleh arena dan kerangka negara-bangsa sendiri. Namun demikian, situasi globalisasi dan mulai tumbuhnya kesadaran memperibumikan ilmu itu sendiri, telah dengan sendirinya mengikis kalau tidak pun meruntuhkan perbatasan daerah analisis yang sudah begitu terbiasa dilakukan dalam memahami, misalnya sarjana Malaysia hanya meneliti di Malaysia, sementara itu sarjana Indonesia dan sarjana Brunei Darussalam tentang negaranya sendiri. Coba bayangkan, ketika kongres sosiologi sedunia di Bielefeld, tahun 1994, ketika sesi perbincangan tentang Niklas Luhmann, ternyata yang berbicara pada sesi itu tujuh sarjana Jepang dengan dihadiri oleh Luhmann sendiri, yang perbincangannya pun

disampaikan dalam bahasa Jerman. Itu semua, nyatanya merupakan suatu tradisi pengembangan kajian ilmu tidak mengenal batas negara-bangsa dan daerah analisisnya yang tidak dibatasi oleh wilayah politik. Jadi, bagi orang Jepang, konon, ketika menuntut ilmu di luar negaranya, ia selalu mengambil pokok kajiannya berdasarkan di mana ia belajar, seperti halnya disebutkan di atas.

Pemikiran Abdul Halim Ali tersebut, boleh dijadikan pijakan untuk melakukan penelitian bersama para sarjana guna membina keilmuan yang berasaskan kenyataan yang ada di pulau ini. Dari sekian puluh makalah yang dibentangkan dalam konferensi ini, sebagian besar merujuk pada data dan informasi tentang pulau Borneo-Kalimantan yang kemudian ditafsirkannya melalui pemikiran teori dan konsep-konsep ilmu sosial yang dibentuk berdasarkan tradisi Barat. Cara serupa itu, mungkin tidak terlalu salah tetapi merujuk pada pendapat Sunyoto Usman, menjadi kurang begitu tepat, sebab hanya dipandang dari teori dan metodologi Barat, yang acapkali menganggap bahwa suatu realitas yang dipahaminya itu menjadi pola sesuai dengan teori yang ada, padahal dalam prakteknya sesuatu hal yang telah ada (jadi) itu masih perlu dinilai sebagai berproses, artinya, bukan sesuatu yang telah ada atau jadi.

Lain halnya, bila pemahaman itu disandarkan kepada realitas yang sesungguhnya dalam kehidupan sosial dan kemanusiaannya, sebagaimana Geertz memahami realitas sosial budaya yang berlangsung di tempat kajiannya. Dalam tataran ini, Geertz, lebih mengutamakan mengerti data yang tersaji melalui realitas itu sendiri. Lanjutnya, setiap peristiwa dalam masyarakat adalah semacam komentar terhadap kejadian lainnya. Ia, mengumpamakan, kalau orang cukup berlapang hati dan mau membuka mata dan telinga, maka sebuah kedipan mata dapat menerangkan epistemologi dan sebuah peribahasa dapat merujuk ke sebuah revolusi. Karena itu, boleh juga membenarkan pendapat Geertz, bahwa kebanyakan sarjana di Indonesia kerap kali bergantung kepada teori yang dibuat peneliti asing ketimbang sarjana Indonesia

sendiri membangun teorinya. Sebab, bagi Geertz sendiri, mengenai teori, perlu dibuat catatan, teori itu bukan otoritas tetapi hanya instrumen. Kalau berguna dan cocok silahkan pakai, kalau tidak boleh dibuang. Dalam pengertian ini, bagi Geertz tampaknya, thick description metode yang cocok untuk mendalami proses-proses perubahan sosial misalnya sebelum kita berbicara tentang hasil-hasil pembahasan sosial yang dihadapinya.

Simpulan

Borneo-Kalimantan: Satu Pulau Dua Nama Tiga Negara Bersama Kaboka Merentas Ke Puncak Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Sebagaimana judul makalah ini, itu bermakna, bahwa pulau ini memiliki dua nama yakni Borneo menjadi sebutan resmi nama pulau di negara Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan Kalimantan menjadi sebutan resmi Indonesia untuk pulau tersebut. Itu artinya, menunjukkan, bahwa dalam satu pulau yang sedemikian itu melingkupi tiga negara yang dalam konteks pengembangan keilmuan.

Referensi

- Abdul Halim Ali. 2005. Transformasi Sosial Masyarakat Pesisir Borneo-Kalimantan. Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak. Kota Samarahan. Sarawak.
- _____. 2006. Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan/Bandar Borneo-Kalimantan. Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak. Kota Samarahan. Sarawak.
- _____. 2007. Transformasi Sosial Kebijakan/Dasar Pembangunan di Borneo-Kalimantan. Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak. Kota Samarahan. Sarawak.
- _____. 2008. Transformasi Sosial Masyarakat Pedesaan dan Pesisir Borneo-Kalimantan. Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak. Kota Samarahan. Sarawak.
- Abdul Rahman Embong. 1995. Pendahuluan: Satu ulasan untuk Mengembangkan Tradisi Ilmu Sosial Malaysia. Dalam Abdul Rahman Embong (ed). *Antropologi dan*

realitas perbedaan negara dapat menunjukkan perbedaan arah dan orientasi keilmuan yang berkembang sesuai dengan arah ideologi masing-masing negara-bangsa yang menaunginya.

Namun demikian, melalui KABOKA (Konferensi Antaruniversiti se Borneo-Kalimantan), sedikitnya arah dan orientasi pengembangan keilmuan di masing-masing negara yang berbeda-beda itu, boleh jadi berkurang di dalam memahami isu transformasi sosial di pulau Borneo-Kalimantan, sebagaimana menjadi arah dan tujuan diselenggarakannya konferensi ini.

KABOKA dapat menjadi wahana terjalinannya kerjasama keserjanaan di dalam memahami fenomena isu transformasi sosial di pulau ini tanpa tersekat-sekat oleh adanya batas negara dan lingkup ilmu pengetahuan yang melandasinya. Demikian pula melalui KABOKA ini menjadi wacana dalam membangkitkan gairah para sarjana untuk memperibumikan ilmu sosial dan kemanusiaan sesuai dengan alam sosial, alam budaya dan alam fisik pulau Borneo-Kalimantan

Sosiologi: Menggaris Arah Baru. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.

- _____. 2003. *Pembangunan dan Kesejahteraan: Agenda Kemanusiaan Abad Ke-21*. Syarahan Perdana Universiti Kebangsaan Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.
- Alatas, S.F. 2000. An introduction to the idea of alternative discourses. *Southeast Asia Journal of Social Science* 28(1): 1-12.
- Dahlan, H.M. 1990. Perkembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Malaysia: Beberapa Persoalan Umum. Dalam Judistira K. Garna, Rustam A. Sani (ed). *Antropologi Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan*. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia I UKM-UNPAD. Bangi: Penerbit UKM.
- Evers, Hans-Dieter and Tilman Schiel (1992). *Kelompok-Kelompok Strategis. Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indones

- Geertz, Clifford. 1963a. *Agricultural Involvement: the Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- _____. 1963b. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____. 1968 *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____. 1973b *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- _____. 1973d Religion As a Cultural System. In *The Interpretation of Cultures*. Pp. 87-125. New York: Basic Books.
- _____. 1973e Ritual and Social Change: A Javanese Example In *The Interpretation of Cultures*. Pp. 142-169. New York: Basic Books.
- _____. 1980 Negara: The Theatre-State in Nineteenth Century Bali. Princeton: Princeton University Press.
- Isak Shari et al. 1999. Senario Masa Hadapan Sains Sosial dan Kemanusiaan di Malaysia. Kertas Kerja Jawatankuasa Senat Tentang Penstrukturan Semula Gugusan Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Koentjaraningrat dan S. Boedhisantoso. 1990. Erti Antropologi Untuk Indonesia Masa Ini. Dalam Judistira K. Garna, Rustam A. Sani (ed). *Antropologi Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan*. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia I UKM-UNPAD. Bangi: Penerbit UKM.
- Kuang-Hsing Chen. 2010. *Asia as Method: Toward Deimperialization*. Duke University Press.
- Popkin, Samuel L (1979) *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Rahimah Abdul Aziz. 2005. Pengajian Ilmu Antropologi dan Sosiologi di Universiti Kebangsaan Malaysia: Menoleh ke Belakang, Melangkah ke Hadapan. *Akademika* Bil. 66: 51-80
- Ramasamy, P. 1983. The State of Social Sciences in Malaysia: A Brief Historical Review. *Ilmu Masyarakat*. Bil. 4:67-69.
- Rustam A. Sani. 1990. Orientasi Antropologi-Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Kini: Ke Arah Ilmu Sosial Baru?. Dalam Judistira K. Garna, Rustam A. Sani (ed). *Antropologi Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan*. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia I UKM-UNPAD. Bangi: Penerbit UKM.
- Rustam A. Sani dan Norani Othman. 1991. The Social Sciences in Malaysia: A Critical Scenario. *Akademika*. Bil. 38:5-28.
- Scott, James: *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, (Yale, 1977).
- Shamsul Amri Baharuddin. 1993. *Antropologi dan Modernisasi: Mengungkapkan Pengalaman Malaysia* Syarahan Perdana Universiti Kebangsaan Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.
- _____. 1998. Ethnicity, Class, Culture or Identity? Competing Paradigms in Malaysian Studies. *Akademika*. Bil. 53: 33-60.
- _____. 2000. " 'Ilmu Kolonial' dan Pembinaan 'Fakta' Mengenai Malaysia". Dalam Rahimah Abd. Aziz, et al, *Masyarakat, Budaya dan Perubahan*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sunyoto Usman. 2011. Kembangkan Ilmu Keindonesiaan Metodologi Barat Belum Tentu Sesuai. *Surat Kabar Kompas*. Sabtu, 22 Januari.
- Tham Seong Chee. 1981. *Social Science Research in Malaysia*. Singapore: Graham Brash Ltd.
- Yugo Sariyun. 1990. Orientasi Antropologi-Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Kini: Ke Arah Ilmu Sosial Baru?. Dalam Judistira K. Gama, Rustam A. Sani (ed). *Antropologi Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan*. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia I UKM-UNPAD. Bangi: Penerbit UKM.